

PPTRA Berpartisipasi dalam ESRI User Conference 2018

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengetahuan dan pengembangan teknologi terkait pemetaan tata ruang serta menambah relasi dalam dunia pemetaan, pada tanggal 27 September 2018, tim dari Bidang Pemetaan Tata Ruang mengikuti ESRI User Conference 2018. Konferensi yang bertema "Smart City Thinking" ini diadakan di Max Atria @ Singapore Expo, Singapura, dihadiri oleh kurang lebih 700 delegasi dari sekitar 100 negara dari berbagai benua.



Sambutan ESRI

Pertemuan ilmiah ini dibuka oleh Thomas Pramotedham, selaku CEO Esri Singapura.

Dalam paparannya beliau menyampaikan pentingnya pola pikir "Smart City Thinking" dalam kehidupan sehari-hari. Secara operasional, variabel-variabel penentu pola tersebut adalah *safe, efficient, livable, healthy, prosperous dan sustainable*.

Turut hadir Jack Dangermond, *company president* ESRI yang berasal dari California, Amerika Serikat. Pada kesempatan ESRI UC kali ini beliau menyampaikan banyak inspirasi terutama terkait tema yang diusung yaitu *Creating a smarter future for a complex world*. Dalam paparannya disampaikan bahwa ada keterkaitan erat antara ilmu geografi, *spatial thinking* dengan perubahan pada suatu kota. Perubahan suatu kota ke arah yang lebih baik akan meningkatkan kualitas hidup penduduk, termasuk kebahagiaan masyarakatnya.

Dalam sesi *plenary*, para pembicara banyak menyampaikan manfaat-manfaat yang sudah dirasakan dengan memanfaatkan teknologi GIS. GIS cukup memudahkan pekerjaan untuk pemangku kepentingan dan penentuan kebijakan, seperti untuk kebencanaan,

perbankan, konservasi, manajemen hutan dan taman, peningkatan RTH di lahan sempit, perencanaan tata ruang dalam bidang 3 dimensi dan lain sebagainya. Bagi BIG, forum ini cukup bermanfaat. Banyak manfaat, inspirasi, ide setelah mengikuti konferensi ini yang bisa diaplikasikan di masing-masing unit organisasi di BIG. Secara khusus untuk pemetaan tata ruang sendiri, beberapa contoh penerapan yang bisa dipelajari terutama perencanaan tata ruang 3 dimensi beserta publikasi petanya secara *online*, serta pemetaan terkini terkait kebencanaan dan tata ruang. [Chintia Dewi, 2018]



Suasana Forum

TATA RUANG & ATLAS NEWSLETTER

MEDIA INFORMASI PEMETAAN TATA RUANG, DINAMIKA SUMBERDAYA, DAN ATLAS

CATATAN BERANDA

Berbagai cara dilakukan organisasi saat merayakan ulang tahun hari kelahirannya. Demikian pula BIG pada 17 Oktober ini berulang tahun ke 49 sekaligus diperingati sebagai Hari Informasi Geospasial ke 7. Perayaan kali ini, khususnya Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) mengundang murid-murid SLB (Sekolah Luar Biasa) Kabupaten Bogor dan sekitarnya untuk mengenal NKRI dan dunia melalui atlas taktual kepada murid disabilitas netra. Selain membuat peta dasar dan tematik khusus untuk khalayak awas, BIG melalui PPTRA menghasilkan peta taktual atau peta timbul khusus untuk tuna netra dengan huruf braille dan objek timbul. Tak terhitung produk BIG untuk komunitas awas, tetapi peta taktual untuk penyandang disabilitas netra masih bisa dihitung dengan jari. Menurut UU No. 8/2016 penyandang disabilitas mempunyai hak mendapatkan informasi yang mudah diakses

termasuk informasi geospasial. Untuk itulah pengenalan NKRI dan dunia menjadi penting bukan sekadar mengajarkan mereka membaca tetapi juga mengenal posisi Indonesia di dunia, sehingga menjadi lebih cinta kepada tanah air.

Usia 49 tahun menurut skala umur manusia adalah masa usia separuh baya, yang tidak lagi muda tetapi belum terlalu tua untuk berkarya bahkan puncak produktivitas bermula pada usia paruh baya ini. Oleh karena itu tepat sekali slogan HUT BIG kali ini, yaitu **SATU PETA, KERJA KITA, PRESTASI BANGSA**. Pesan Kepala BIG Prof. Dr. Hasanuddin Z Abidin, bahwa slogan tersebut tentu perlu dibuktikan. Selama ini BIG sudah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, oleh karena itu indeks prestasi instansi BIG seharusnya diukur pula dari seberapa banyak produk BIG yang bermanfaat bagi masyarakat banyak termasuk penyandang disabilitas.

Alhamdulillah patut disyukuri dihari ulang tahun ini, PPTRA menerima penghargaan dari Inspektorat sebagai pusat yang paling banyak melaporkan gratifikasi yang diterima. Sebuah kado indah buat semua staf di PPTRA,



hususnya yang melakukan asistensi dan validasi peta tata ruang wilayah. Sebagai bukti bahwa kami semua di PPTRA berupaya kerja keras juga tidak lupa niat ikhlas. Tugas berat tentu telah menanti kami di depan, meningkatkan jumlah rekomendasi peta tata ruang yang diperiksa, peningkatan produk atlas dan pemetaan sosial serta kajian-kajian dinamika spasial. Akhirnya, bersama BIG terus berjuang, ulang tahun pada oktober berseri, bila ada waktu luang, silahkan tuan puan baca newsletter ini. [Mulyanto Darmawan, 2018]

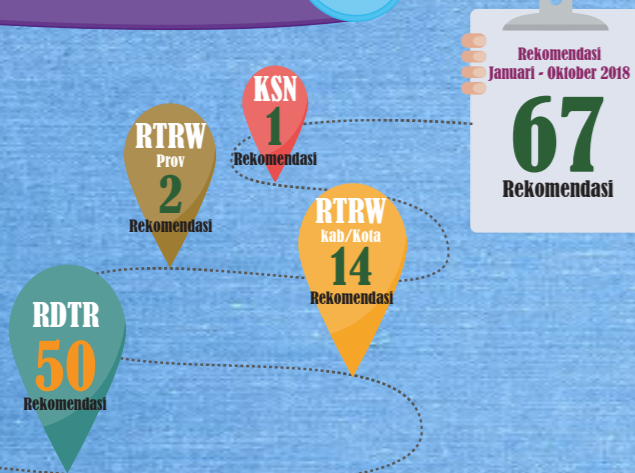


Penyerahan piagam dari kepala BIG

Rekomendasi Periode Januari-Oktober 2018

Rekomendasi Peta RTR	RDTR	RTRW Kab/Kota	RTRW Provinsi	KSN	Total
Gorontalo	0	0	1	0	1
DIY	0	0	1	0	1
Jawa Barat	6	2	0	0	8
Sumatera Selatan	0	1	0	0	1
Jawa Timur	17	4	0	0	21
NTT	0	2	0	0	2
Jawa Tengah	1	3	0	0	4
Sulawesi Barat	3	1	0	0	4
Sulawesi Selatan	7	0	0	0	7
Sulawesi Tenggara	1	0	0	0	1
Bali	2	0	0	0	2
Banten	2	1	0	0	3
Sumatera Barat	3	0	0	0	3
Kalimantan Utara	1	0	0	0	1
Kalimantan	0	0	0	1	1
Bangka Belitung	1	0	0	0	1
Papua	6	0	0	0	6
Jumlah	49	14	2	1	67

PROGRES ASISTENSI & SUPERVISI PETA TATA RUANG



Partisipasi PPTRA untuk Hari Informasi Geospasial



Geoliterasi Untuk Negeri
Mengetahui NKRI & Dunia Melalui Atlas Taktual

GRATIFIKASI SAYA NO

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Gedung F Lantai 2
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Telp - PPTRA : (021) 8764613
Fax - PPTRA : (021) 8764613
Email : redaksi.pttra@gmail.com
Twitter : @pptra_big
Instagram : @pptra_big
http://big.go.id/newsletter/



ISU STRATEGIS & INFO KEBIJAKAN

Boleh dibilang Pemerintah sedikit terlambat dalam mengatur dan menyiapkan kebijakan terkait data. Bekangan ini, data banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan seperti aparat pemerintah, masyarakat, bisnis, penegak hukum, dan masyarakat sipil. Sering kali dalam debat publik yang kita lihat diberbagai media, data yang bersifat resmi selain menjadi rujukan juga sekaligus acuan yang tidak dapat dibantah, segala argumen yang diperdebatkan sering kali ditutup dengan kata bijak 'kita semua akan menerima argumen tersebut apabila didukung dengan data yang lengkap dan akurat'. Begitu pentingnya arti sebuah data yang memiliki informasi penting dan memiliki efek penting pada sebuah aktivitas, dimana data diperlukan mulai dari suatu awal perencanaan, proses analisis, sampai output suatu aktivitas yang juga mengeluarkan suatu data (informasi).

yang menyatakan 'Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan'.

Dari beberapa diskusi dengan Bappenas, sering kali kita mendapatkan penerjemahan pasal ini yang kira-kira berarti bahwa data yang dimaksud adalah data yang bersifat angka-angka numerik, sementara informasi yang dimaksud adalah informasi geospasial yang memberikan dimensi keruangan terhadap sebuah data. Tentunya ini menjadi landasan yang sangat prinsip sekaligus menjamin pelaksanaan pembangunan yang lebih terukur.

Dari sektor informasi geospasial, diawali dengan lahirnya UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, menjamin tersedianya satu referensi pemetaan yang sama dan memastikan informasi geospasial yang dihasilkan oleh seluruh pemangku data spasial menggunakan referensi pemetaan yang sama sehingga untuk dapat digunakan secara akurat dalam mendukung program pembangunan nasional dan daerah. Pemerintah juga sudah lebih sigap menyelesaikan pekerjaan rumah tentang data dan informasi geospasial dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Satu Peta yang menjamin adanya satu data referensi pada sektor data geospasial tematik.

Kebijakan publik, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan kinerja pemerintah, hingga peluang bisnis, semuanya membutuhkan data yang kredibel. Sayangnya, dalam praktiknya data masih sering tidak dikelola secara serius. Masih banyak ditemukan kasus di mana terdapat data yang tidak hanya memiliki beragam versi, namun sering juga saling kontradiktif di antara satu dengan yang lainnya.

Inisiatif Satu Data, atau yang biasa disebut Satu Data Indonesia, merupakan salah satu inisiatif pemerintah Indonesia yang mencoba untuk membenahi permasalahan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan data pemerintah tersebut. Satu data memiliki tiga prinsip utama yaitu; satu standar data, satu metadata baku, dan satu portal data. Dengan demikian, pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antara instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi publik. Kita berharap, kebijakan Satu Data Indonesia dapat segera terealisasi dengan harapan dapat menstimulasi upaya-upaya perbaikan tata kelola data pemerintahan di Indonesia, artinya penggunaan data akan semakin terstruktur dan akan meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik di Indonesia. [Habib Subagio, 2018]

REDAKSI:

| Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | Tim Redaksi: Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas |
| Editor: Mulyanto Darmawan, Fakhruddin Mustofa, Sri Eka Wati, Roswidyatmoko D., Randhi Atiqi, Chintia Dewi |
| Desain Tata Letak: Ika Rosalika |

Diseminasi Informasi Geospasial BIG bersama Komisi VII DPR RI di Kota Mataram



Suasana Diseminasi

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan pemanfaatan Informasi Geospasial (IG) masyarakat di Nusa Tenggara Barat, BIG melaksanakan acara Diseminasi IG dengan tema "Peran Geospasial dalam Pembangunan Daerah". Acara berlangsung hari Senin, 8 Oktober 2018 di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, dihadiri kurang lebih 150 peserta dari masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi. Forum ini dimanfaatkan BIG untuk mengenalkan tugas dan peran BIG dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Forum ini bekerja sama dengan Komisi VII DPR RI yang menangani bidang energi, riset teknologi, dan lingkungan hidup. BIG sebagai mitra kerja DPR RI Komisi VII, merupakan

instansi yang bertugas menyediakan IG dasar dan melakukan pembinaan terhadap penyusunan IG tematik. Kedua IG tersebut berperan penting dalam mendorong kemajuan bidang yang ditangani oleh Komisi VII. Pembicara utama pada acara ini adalah Dr. H. Kurtubi, anggota Komisi VII DPR RI wakil dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beliau menyampaikan mengenai alur proses bisnis yang dijalankan BIG, kerjasama yang dijalin dengan pemerintah daerah, serta produk dan manfaat dari IG. Tutar bahasa anggota DPR ini mudah dipahami sehingga peserta cukup mengerti. Sesi berikutnya disampaikan beberapa tema terkait Kebijakan Satu Peta dan Peran Pemetaan Tata Ruang terhadap Pembangunan Daerah, yang disampaikan oleh Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, serta Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA).

PPTRA menyampaikan pentingnya peta dalam rencana tata ruang dan pembangunan daerah. Disebutkan ada dampak negatif bila sebuah daerah tidak menggunakan rencana tata ruang yaitu ruang-ruang yang ada di daerah tidak tertata, bermasalah dari segi lingkungan hidup, serta berbahaya dari segi

POTRET KEGIATAN

kebencanaan. Dalam pengelolaan tata ruang, analisa IG merupakan salah satu syarat dalam membantu memecahkan berbagai konflik penataan dan pemfaatan ruang. Manfaat peta dalam rencana tata ruang adalah memberikan informasi secara keruangan mengenai ketentuan pembangunan, potensi, serta risiko dari sebuah wilayah, sehingga para pembuat kebijakan, masyarakat, dan investor dapat melihat lokasi yang tepat untuk pembangunan dan mengalokasikan area tertentu untuk fungsi lindung.

Lebih jauh disampaikan, bila dukungan teknologi informasi disematkan ke dalam IG rencana tata ruang, maka berbagai manfaat lanjutan dari IG akan semakin terasa. Sebagai contoh bertambahnya partisipasi pembangunan dan pengendalian ruang dari berbagai pihak yaitu adanya fungsi kontrol, dan transparansi. Lebih lanjut dijelaskan tentang contoh pemanfaatan publikasi rencana tata ruang secara online kepada masyarakat, di mana semua pihak dapat melihat peraturan, memantau pemanfaatan dan pengendalian ruang secara komprehensif dan partisipatif. [Marhensa Aditya Hadi, 2018]

PPTRA Bina Disabilitas Netra di Payakumbuh

Pagi nan cerah tanggal 2-3 Oktober 2018, Kota Payakumbuh di tepi Gunung Sago dan Bukit Barisan menjadi tempat nyaman berlatihan bagi seluruh peserta yang hadir. Rima Bur, selaku Kepala Sekolah SLB A Payakumbuh berterimakasih kepada BIG yang telah menunjuk sekolahnya menjadi tempat acara, sekaligus ajang pembelajaran geospasial bagi siswa-siswanya.

tersebut menjadi pemicu semangat belajar bagi seluruh peserta yang hadir. Rima Bur, selaku Kepala Sekolah SLB A Payakumbuh berterimakasih kepada BIG yang telah menunjuk sekolahnya menjadi tempat acara, sekaligus ajang pembelajaran geospasial bagi siswa-siswanya. Pembelajaran atlas taktual berlangsung selama 2 hari. Hari pertama para peserta mencermati paparan oral dari para narasumber. Pada sesi siang, peserta mulai melakukan kegiatan pembacaan peta dunia, Indonesia, dan 5 pulau besar utama serta pulau-pulau terpilih sekitarnya. Hari kedua, para peserta diuji untuk menjawab 30 pertanyaan model pilihan ganda tentang lokasi, letak, arah, dan yang terkait geospasial di peta yang diraba. Di penghujung acara, para peserta mengungkapkan kegembiraannya karena melalui pembelajaran ini lebih mengenal secara pasti tentang Indonesia dan dunia. Tak lupa pula, BIG memberikan seperangkat peta dan atlas taktual kepada sekolah agar generasi berikutnya dapat mempelajari negaranya. [Fakhrudin M, 2018]



Peta Taktual Dunia untuk tunanetra

Bimbingan Teknis Penyusunan Peta RDTR Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tenggara

Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) mengadakan Bimbingan Teknis Penyusunan Peta RDTR Kabupaten/Kota pada tanggal 1-5 Oktober 2018 di Kendari, untuk Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Fokus bimbingan mengenai tahapan dan spesifikasi untuk penyusunan Peta RDTR. Selain bimbingan teknis, acara ini juga menjadi ajang diskusi desk dan konsultasi pemetaan untuk percepatan penyelesaian Peta RDTR di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. H. Sarifudin Sya'aa, SH, MM. Beliau memaparkan bahwa dalam rangka mewujudkan penyusunan RDTR sesuai amanat UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah daerah perlu menyusun secara rinci penataan ruang karena merupakan penjabaran RTRW kabupaten/kota dan rencana ruang strategisnya. Lebih lanjut, kendala terbesar dalam penyusunan RDTR adalah minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang penataan ruang, sehingga proses teknis penyusunan dokumen memakan waktu cukup lama. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di daerah, sehingga RDTR cepat diselesaikan. Ryan Pribadi, ST, Kepala Bidang Tata Ruang, PPTRA, menambahkan forum ini penting karena merupakan strategi dalam percepatan proses penyelesaian Peta RDTR. Pihak daerah dapat langsung konsultasi di forum ini sehingga permasalahan dan kendala dalam penyusunan Peta RDTR dapat langsung diselesaikan. PPTRA juga menyampaikan pentingnya peran rencana tata ruang dalam pembangunan. Salah satunya sebagai acuan penyusunan RPJPD dan RPJMD, yang di dalamnya akan mengatur hal-hal yang spesifik mengenai pengendalian pemanfaatan ruang.

Hadir juga perwakilan Direktorat Tata Ruang dan Pertanian Kementerian PPN/BAPPENAS, Elmy Yasinta Ciptadi, ST, yang menyortir pentingnya penataan ruang untuk mendukung KEK dan KI di Sulawesi demi tercapainya pemerataan ekonomi. Pemapar lainnya, Rusdilan, ST, dari Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara, menyampaikan permasalahan penataan ruang di Sulawesi adalah ketimpangan pemanfaatan ruang antara masing-masing dinas, permasalahan ijin pertambangan, dan permasalahan lainnya. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menghambat penanaman modal oleh investor. [Devita Remala Sari, 2018]

Verifikasi Kajian Analisis Kemampuan Lahan untuk Arahan Peta RDTR BWP Merawang

Kegiatan verifikasi kajian analisis kemampuan lahan dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian tahapan pekerjaan "Penyusunan Dataset Peta RDTR Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018". Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi aktual terkait dengan kondisi penggunaan lahan dan karakteristik morfologi daerah yang menjadi sampel uji. Aktivitas verifikasi ini dilaksanakan pada tanggal 24-27 September 2018 berlokasi BWP (Bagian Wilayah Perencanaan) Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Metode yang digunakan dalam survei ini adalah memverifikasi titik-titik yang telah ditentukan sebarannya. Penentuan titik-titik tersebut mempertimbangkan seluruh karakteristik wilayah dalam satuan kemampuan lahannya tapi diprioritaskan untuk nilai kelas terendah.

Setelah dilakukan analisis, diperoleh 40 titik yang akan dijadikan sebagai titik objek survei lapangan. Survei yang akan dilakukan meliputi kegiatan verifikasi dari parameter utama pembentuk satuan kemampuan lahan yang dapat dilihat / diperkirakan dengan kasat mata tanpa harus melalui uji laboratorium ataupun pengamatan yang bersifat periodik, yaitu penggunaan lahan, kemiringan, dan morfologinya.

Hasil survei lapangan diolah dan dianalisis kesesuaian dari kenampakan di lapangan dengan kenampakan pada peta maupun hasil satuan kemampuan lahannya. Tingkat kesesuaian morfologi hasil analisis

dengan hasil verifikasi lapangan adalah sebesar 55,00%. Tingkat kesesuaian tutupan lahan hasil interpretasi citra dengan hasil verifikasi lapangan adalah sebesar 62,50%. Hasil survei lapangan kemudian dilakukan Perhitungan Uji Konsistensi dengan menggunakan metode Cohens Kappa.

Rekapitulasi Kesesuaian	Penilaian Tutupan Lahan		Jumlah	Rasio
	Sesuai	Tidak Sesuai		
Penilaian Morfologi	(a) = 19	(b) = 3	22	0,55 (R1)
	(c) = 6	(d) = 12	18	0,45 (R2)
Jumlah	25	15	40	
Rasio	0,625 (R3)	0,375 (R4)		

$Pr(a) = \{(a+d)/(a+b+c+d)\}$	0,775
$Pr(e) = \{(R1 \cdot R3) + (R2 \cdot R4)\}$	0,513
$K = (Pr(a) - Pr(e)) / (1 - Pr(e))$	0,54

Dalam perhitungan pengujian secara statistik, metode yang digunakan adalah Metode Cohens Kappa. Hasil perhitungan diperoleh Koefisien Kappa sebesar 54%. Angka persentase ini berarti tingkat konsistensi parameternya termasuk dalam kategori moderat/menengah. Dari hasil tersebut, antara parameter morfologi dengan parameter tutupan lahan sebagai parameter utama pembentuk Satuan Kemampuan Lahan sudah konsisten. [Suspima Wulandari, 2018]

Bimbingan Teknis Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam



Peserta Bimtek

Pengelolaan lingkungan hidup memerlukan instrumen spasial dalam pelaksanaannya. Salah satu instrumen spasial yang dapat digunakan adalah neraca sumber daya alam (NSDA). UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa salah satu instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi adalah neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Mengingat pentingnya NSDA, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BIG mengeluarkan Surat Edaran Bersama No. 660/2367/SJ/83.KA/RT/6/2012 yang menghimbau pemerintah daerah untuk menyusun NSDA Spasial Daerah. Tujuannya adalah untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang efisien pada tahun 2030.

Untuk meningkatkan kompetensi pemerintah daerah dalam menyusun NSDA, BIG melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan NSDA pada tanggal 24-29 September 2018 di Hotel Aston Inn Pandanaran, Semarang, sebanyak 39 orang peserta yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten

terpilih di Provinsi Jawa Tengah, dilatih untuk menyusun NSDA empat komponen (air, hutan, lahan, mineral dan batubara). Acara dibuka oleh Deputy Bidang IGT, Dr. Ir. Nurwadjadi, M.Sc, mengangkat tema Pemanfaatan Neraca Spasial Sumberdaya Alam untuk Mendukung Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Hadir juga Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Dr. Ir. Mulyanto Darmawan, M.Sc, acara ini juga dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Ir. Sugeng Riyanto, M.Sc, yang mewakili sekaligus membacakan sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Setelah pembukaan, peserta diberikan materi, baik konsep maupun praktik terkait NSDA. Untuk memperkaya materi, beberapa narasumber dilibatkan yaitu Yudhi Timor Bimo Prakoso, S.T, M.Sc (Kementerian Dalam Negeri), Ir. Nurhayati, M.Sc (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Prof. Waluyo Hatmoko, M.Sc (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Untuk sesi praktik, para peserta dibimbing oleh staf analisis Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya yang telah memiliki kompetensi dalam menyusun NSDA. Selama lima hari bimbingan teknis, peserta diharapkan memahami manfaat dan pentingnya penyusunan neraca spasial SDA serta mampu menyusunnya sebagai bagian penting instrumen spasial perencanaan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup berbasis spasial. Lebih jauh lagi, pemerintah daerah mampu memanfaatkan NSDA untuk mendukung penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sebagaimana amanat Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD. [Sri Eka Wati, 2018]

Resensi Buku

KARTOGRAFI

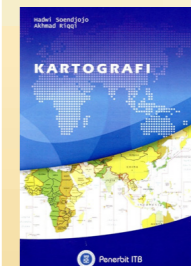
"Peta yang dihasilkan dari sejumlah data dan informasi muka bumi diharapkan penyajiannya dapat digunakan dengan baik oleh pengguna peta. Peta sebenarnya adalah bentuk 'visual' dari komunikasi, atau dengan kata lain, pengguna peta mendapat informasi muka bumi lewat mata (menggunakan indera mata)." Kalimat yang ditulis dalam pengantar buku ini memberi gambaran pengertian kedudukan peta yang memiliki kaitan erat dengan proses kartografi.

Pada bagian awal, buku ini menerangkan sejarah singkat pembuatan peta di Indonesia sejak abad XVI sampai dengan tahun 1990. Selain itu juga dijelaskan mengenai pengertian peta, pemetaan, dan kartografi termasuk penggunaan teknologi konvensional dan digital.

Kemudian pada bab 2 dijelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan aspek geometrik dalam pembuatan peta. Aspek geometrik memberikan penjelasan tentang pengertian proyeksi peta, macam-macam proyeksi peta, sistem proyeksi peta yang digunakan pada peta di Indonesia, skala dan cara penyajian peta, konstruksi peta untuk pembuatan peta, serta cara membaca koordinat pada peta topografi.

Pada bab 3 diulas mengenai pentingnya desain peta di dalam pembuatan peta. Dan dalam bab 4 diuraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peta topografi.

Selanjutnya pada bagian akhir digambarkan secara singkat tentang peta tematik dan contoh-contohnya, serta teknologi kartografi yang sedang berkembang. Bagi yang menekuni dunia pemetaan, buku ini wajib dimiliki sebagai salah satu dasar dalam mengembangkan peta untuk kemaslahatan manusia. [Rochmad Budi Santoso, 2018]



Judul Buku : Kartografi
Penyusun : Hadwi Soendjojo dan Akhmad Riqqi
Penerbit : ITB, Bandung 2016